

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

##### **A.1. Definisi Anak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan

<sup>8</sup>. Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>9</sup>

Pengertian anak menurut peraturan perundangundangan dapat dilihat sebagai berikut :

##### **a. Kitab Undang –Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**

Dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21

---

<sup>8</sup> Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002

<sup>9</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung :Sumur, 2005. hal. 113

tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.<sup>10</sup>

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.<sup>11</sup>

c. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

d. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 butir 5 "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Batasan umur anak sangat penting dalam perkara pidana anak, karena digunakan untuk menggolongkan apakah seseorang tersebut termasuk

---

<sup>10</sup> KUHPerdara.

<sup>11</sup> KUHPidana

seorang anak atau bukan. Di Indonesia, seseorang dikatakan anak bila seseorang berusia kurang dari 18 tahun.

## **A.2 Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>12</sup>

Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli yaitu:

- a) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000. hal. 53

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987. Hal. 25

- b) Menurut Soetjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat.
- c) Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d) Menurut Muktie, A. Fajar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.
- e) Menurut Soedjono Dirdjosisworo pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang

dikemukakan menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.

### **A.3 Perlindungan Hukum Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.<sup>14</sup>

Perlindungan Anak merupakan suatu perlindungan hukum yang membawa akibat hukum, oleh karena itu perlu adanya suatu jaminan hukum. Dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.<sup>15</sup>

Sedangkan pengertian hukum perlindungan anak, beberapa ahli memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Arit Gosita mengatakan : “Bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis) maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya”.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Kementrian Peberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id), access 12 November 2018.

<sup>15</sup> Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>16</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990. hal.14.

- b. Bismar Siregar menyebutkan: “Aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban”.
- c. Prof. Mr. J. E. Doek dan Mr. H. MA. Drewes memberikan pengertian hukum perlindungan anak adalah: “Segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang”.

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>17</sup>

## **B. Tindak Pidana Pencurian**

### **B.1. Definisi Tindak Pidana**

*Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum.

---

<sup>17</sup>Darwan Prints, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 146.

Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>18</sup>

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi :

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>19</sup>

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta: Grafindo, 2002, hal 69.

<sup>19</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 91.

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008, hal. 58.

## **B.2. Pencurian**

### **1. Definisi Pencurian**

Berbicara tentang pengertian pencurian menurut Lili Rassidi (1988 ; 8) adalah perbuatan seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan menyebabkan seseorang tersebut menderita kerugian. R. Soesilo (2000:168) membedakan pengertian pencurian secara juridis dan pengertian pencurian secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian pencurian adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Berdasarkan pengertian ahli diatas, pencurian adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja secara sendiri ataupun bersama-sama mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan tujuan untuk menguasai barang tersebut.

### **2. Pencurian Menurut KUHpidana**

Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 macam pencurian, yaitu :

- 1) Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)



Pencurian di dalam bentuk Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi *“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”*<sup>21</sup>

Melihat dari rumusan Pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana dilarang dan diancam dengan hukuman. Dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

Menerjemahkan perkataan “zich toeëigenen” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya akan memahami, bahwa “zich toeëigenen” mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki” yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiritermasuk di dalam pengertian “zich

---

<sup>21</sup> Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

toeigenen” seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>22</sup>

## 2) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Istilah ”pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai ”pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

## 3) Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan :

*“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga*

---

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal 49.

*barang yang dicuri tidak lebih dari puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.*

#### 4) Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah ”pencurian dengan kekerasan” atau populer dengan istilah ”curas”. Ketentuan Pasal 365 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut :

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

#### 5) Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

### **B.3. Konsep Pelaku Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana menurut KUHP**

Menurut Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah :

- Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan,

sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 55 KUHPidana yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan sendiri dalam melakukan tindak pidana. Untuk menentukan seseorang sebagai pelaku tindak pidana haruslah memenuhi 2 (dua) criteria, yaitu :

- 1) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
  - 2) Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.<sup>24</sup>
2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana Menurut Ahli
- a. Van Hamel : Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yangt terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.
  - b. Professor Simon : Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undangtelah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tuindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan

---

<sup>23</sup> KUHPidana

<sup>24</sup> *Ibid*, KUHPidana

oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsure-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

#### **B.4. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**

Istilah “Pencurian dengan Pemberatan” biasanya secara doctrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. (Wirjono Prodjodikoro, 1986: 19)

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan daiatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena itu, pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsure-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.<sup>25</sup>

Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Dr. Tongat, SH., M. Hum, *Hukum Pidana Materi*, Malang: UMM Press, hal. 22.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun :

ke-1 Pencurian ternak

ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenai pidana paling lama Sembilan tahun. Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan unsure-unsur dalam Pasal 363 KUHP.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid, Dr. Tongat, SH., M. Hum, *Hukum Pidana Materi*. Hal. 22

Untuk melihat unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP, langkah pertama yang diambil adalah melihat unsure-unsur dalam pasal 362 KUHP. Jadi, untuk adanya pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP, harus terlebih dahulu dilihat dan dibuktikan unsure-unsur pasal 362 KUHP. Baru setelah itu, dibuktikan unsure-unsur yang memperberat pencurian tersebut.

Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka unsure unsure dalam pasal 363 KUHP adalah :

1. Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP, yaitu :
  - a. Unsur Obyektif, yang meliputi unsure-unsur :
    - 1) Mengambil
    - 2) Suatu barang
    - 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
  - b. Unsur Subyektif, yang meliputi unsure-unsur :
    - 1) Dengan maksud
    - 2) Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
    - 3) Secara melawan hukum
2. Unsure yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi :
  - a. Pencurian Ternak (ayat (1) ke-1), unsure “ternak” ini menjadi unsure yang memberat tindak pidana pencurian, oleh karena bagi masyarakat (Indonesia) ternak merupakan harta kekayaan yang penting.



Sebagaimana dikatakan dalam pepatah Jawa, bahwa ternak merupakan “rojo koyo”.<sup>27</sup>

- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (ayat (1) ke-2), alasan memperberat ancaman pidana atas pencurian ini adalah oleh karena peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat, yang akan mempermudah orang untuk melakukan pencurian sedang mestinya orang harus sebaliknya memberikan pertolongan kepada korban.<sup>28</sup>
- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak (ayat (1) ke-3), selain unsure-unsur dari Pasal 362 KUHP, dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ini juga memiliki unsur-unsur tersendiri :
  - 1) Unsure “malam”
  - 2) Unsure “dalam sebuah rumah”
  - 3) Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (ayat (1) ke-4), pengertian “bersama-sama” menunjuk pada

---

<sup>27</sup> Ibid, Dr. Tongat, SH., M. Hum, *Hukum Pidana Materi*. Hal. 23

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung :Eresco, 1986, hal. 22

suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama.

- e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu (ayat (1) ke).<sup>29</sup>

## **C. Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian**

### **C.1. Asas Perlindungan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012**

Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan dengan jelas Asas-asas perlindungan anak, yaitu :

#### **1. Asas Perlindungan**

Perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

#### **2. Asas Keadilan**

Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

#### **3. Asas Non-Diskriminasi**

Non-Diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran serta kondisi fisik dan/atau mental.

---

<sup>29</sup> Dr. Tongat, SH., M. Hum, OP.Cit. hal. 27

4. Asas Kepentingan terbaik bagi anak

Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

5. Asas Penghargaan terhadap pendapat anak

Merupakan penghormatan hak atas anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

6. Asas Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

7. Asas Pembinaan dan Pembimbing Anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien permasyarakatan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Penjelasan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2012

8. Asas proposional

Merupakan segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak.

9. Asas perampasan kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai upaya terakhir

Pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

10. Asas pengindaran pembalasan

Prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.<sup>31</sup>

**C.2. Hak-hak Anak dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012**

Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlakukan mengerti permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional dan terpadu. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu interaksi dari adanya interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi.<sup>32</sup>

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012

<sup>32</sup> Dr. Wagianti Soetodjo, SH., M.S., *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, Hal. 69.

Dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengatur hak-hak seorang anak yang beronflik dengan hukum. Pasal 3 berbunyi :

Setiap anak dalam proses Peradilan Pidana berhak :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasi.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat harkat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- n. Memperoleh pendidikan.

- o. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Kemudian Pasal 4 ayat (1) :

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

## **D Pidanaan Anak**

### **D.1. Pidana**

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah menetapkan bagaimana sanksi yang akan diterima anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-undang tersebut berlaku *lexspecialis* terhadap KUHP khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

---

<sup>33</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012.

<sup>34</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012

Pasal 71 Undang-undang SPPA, telah mengatur pidana anak yang berkonflik dengan hukum, sebagai berikut :

- (1) Pidana pokok terhadap anak terdiri atas:
  - a. Pidana Peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat:
    - 1) pembinaan diluar lembaga;
    - 2) pelayanan masyarakat; atau
    - 2) pengawasan.
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga;
  - e. Penjara.
- (3) Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (4) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (5) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.<sup>35</sup>

#### **D.2. Tujuan Pemidanaan**

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Apabila

---

<sup>35</sup> Undang-undang Nomor 11 tahun 2012.

bertolak dari perbuatan di masa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.<sup>36</sup>

Tujuan Pemidanaan berdasarkan R-KUHP tahun 2005, yaitu :

Pasal 54

(1) Pemidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana, dan
- e. Memaafkan terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.<sup>37</sup>

Dalam Pasal 55 R-KUHP terdapat pedoman pemidanaan yang belum diatur dalam Undang-undang.

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan

---

<sup>36</sup> Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Volume 21, Nomor 1, Hal. 100.

<sup>37</sup> Rancangan KUHP.



- a. Kesalahan pembuat tindak pidana.
  - b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
  - c. Sikap batin pembuat tindak pidana .
  - d. Apakah tindak pidana dilakukan berencana.
  - e. Cara melakukan tindak pidana.
  - f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
  - g. Riwayat hidup dan keadaan social dan ekonomi pembuat tindak pidana.
  - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
  - i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
  - j. Pemaafan dan korban dan/atau keluarganya dan/atau
  - k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- (2) riwayat perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.<sup>38</sup>

Dari aturan diatas dapat dicermati bahwa dalam R KUHP menganut teori prevensi, rehabilitasi dan restoratif dalam tujuan pemidanaan. Teori prevensi umum tercermin dari tujuan pemidanaan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat. Teori rehabilitasi dan resosialisasi tergambar dari tujuan pemidanaan untuk memasyarakatkan terpidana, dengan melakukan pembinaan

---

<sup>38</sup> Rancangan KUHP.

sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Dan restorative terdapat dalam tujuan pemidanaan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan memaafkan terpidana.

